

Analisis Prioritas Belanja Desa Pada Dana Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar

(The Priority Analysis Of Village Expenditures On Village Fund At Kayu Bawang, Banjar Regency)

Rakhmatullah*, Ruddy Syafruddin

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
*rakhmatullah20@gmail.com

Abstract

This research aims to (1) find out the village expenditure in the Kayu Bawang village fund in Banjar Regency, and (2) find out the priority of village spending on the right village fund in developing Kayu Bawang Village, Banjar Regency.

The Respondents in this study were six respondents who were considered influential in determining village spending in Kayu Bawang Village, which was used in data processing by using AHP (Analytical Hierarchy Process).

This study's results indicate that the alternative criteria for RPJMDes, Village Potential, and Village Problems influence the determination of village expenditure priorities in the order of preference value of 54% RPJMDes, 30% Village Problems, and 16% Village Potential. Based on these alternative criteria, the preference for village development priorities is 42%, community empowerment is 32%, community development is 20%, and village administration is 6%. With the most dominant conclusion, village development is 42%.

Keywords: *Priority, Village Expenditure, Village Government Organizers, Village Development, Community Empowerment, Community Development, AHP ((Analytical Hierarchy Process) method.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui belanja desa pada dana desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar, dan (2) mengetahui prioritas belanja desa pada dana desa yang tepat dalam membangun Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar

Responden dalam penelitian ini ada 6 responden yang dianggap berpengaruh terhadap penentuan belanja desa di Desa Kayu Bawang yang digunakan dalam pengolahan data menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria alternatif RPJMDes, Potensi Desa dan Permasalahan Desa mempengaruhi penentuan prioritas belanja desa dengan urutan nilai preferensi 54% RPJMDes, 30% Permasalahan Desa dan 16% Potensi Desa. Berdasarkan kriteria alternatif tersebut preferensi pemilihan prioritas belanja Desa pembangunan Desa 42%, pemberdayaan masyarakat 32%, pembinaan masyarakat 20% dan penyelenggaraan pemerintahan Desa 6%. Dengan kesimpulan yang paling dominan adalah pembangunan desa sebesar 42%.

Kata Kunci: *Prioritas, Belanja Desa, Penyelenggara Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, Metode AHP.*

PENDAHULUAN

Kebijakan dana desa ditetapkan pemerintah melalui peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan.

Apatar Desa Kayu Bawang masih melakukan musyawarah untuk menentukan prioritas belanja dana desa yang telah disetujui, dalam pelaksanaan tersebut dana desa di desa Kayu Bawang masih terdapat permasalahan. Diantaranya masih terdapat keterlambatan dalam hal menentukan prioritas. Dana yang besar tersebut harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi masyarakat desa, dengan adanya sistem pengelolaan dana desa, maka pemanfaatan dana desa akan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, salah satu permasalahan pengelolaan belanja dana desa Kayu Bawang adalah bagaimana menentukan prioritas belanja desa yang akan dilaksanakan guna membuat pembangunan di desa menjadi efisien.

Belanja desa di desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar masih terfokus pada pembangunan desa sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat masih belum tergerak. Hal ini dikarenakan selama ini pengambilan keputusan prioritas belanja desa di desa Kayu Bawang di ambil dari rapat badan permusyawaratan desa tidak dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu.

Penelitian ini difokuskan pada proses penentuan prioritas belanja dana desa pada data yang diambil dari dana desa perubahan tahun 2019. Hasil akhir yang diharapkan dengan adanya penerapan sistem dana desa adalah terciptanya efisiensi pembangunan dalam berbagai aspek, baik itu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat maupun pembinaan masyarakat. Maka penelitian ini diharapkan dapat menentukan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Maka dirancang sebuah sistem penunjang dalam membantu aparat desa untuk menentukan belanja desa dalam pembangunan desa serta bermanfaat untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan bagi para pengambil keputusan prioritas pembangunan yang akan dijalankan. Oleh sebab itu terjadi sebuah gap, sehingga penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Prioritas Belanja Desa pada Dana Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar”.

Pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian ini adalah : (1) Bagaimana belanja desa pada dana Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar? (2) Bagaimana menentukan prioritas belanja desa pada dana Desa yang tepat dalam membangun Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui belanja Desa pada dana Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar. (2) Untuk mengetahui prioritas belanja Desa yang tepat dalam membangun Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. (UU No. 6 2014 Pasal 56)

Dana Desa

Dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat melalui transfer APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017)

Prioritas Dana Desa

Dana Desa Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19).

Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Erni Tahir (2018) yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” menunjukkan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian dari Kholida Shuha (2018) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)” menunjukkan perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat.

Penelitian dari Okta Rosalinda (2014) yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi kasus Pada Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)” menunjukkan secara umum pengelolaan ADD di Desa Segodorejo dan Ploso Kerep masih kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi, adanya keputusan Bupati dalam keseragaman perolehan besaran ADD yang setiap tahun sama besarnya. Dalam pemanfaatan dana ADD juga diatur Peraturan Bupati Kabupaten Jombang dimana ada pos-pos anggaran dalam pengalokasiannya. Sehingga pemanfaatan dana ADD menimbulkan kepatenan penerapan besaran nominal penganggaran di setiap pos-pos anggaran. Padahal pelaksanaan ADD sesungguhnya merupakan proses yang didasarkan atas keadaan masyarakat dan desa.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian difokuskan di kecamatan Gambut kabupaten Banjar khususnya desa Kayu Bawang dengan pertimbangan bahwa objek tersebut sangat menarik dan berpotensi untuk dikembangkan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis data ordinal, kuantitatif yaitu data yang berbentuk

angka atau bilangan sedangkan jenis data ordinal yaitu data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. sumber data pada penelitian ini adalah data primer.

Populasi dan Sampel

Peneliti menggunakan pengambilan sampel Non-Probability sampling dengan teknik *Purposive Sampling* atau disebut sampel pertimbangan merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Muhyiddin, Tarmizi, & Yulianita, 2017). Peneliti mengambil sampel 6 responden didasarkan menggunakan metode Saaty yang dimana responden ialah orang yang ahli atau berpengaruh di Desa Kayu Bawang.

Definisi Operasional Variabel

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Kayu Bawang dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Kayu Bawang baik berupa penunjang masyarakat sekitar seperti sarana dan prasarana.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kayu Bawang dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pembinaan Masyarakat

Pembinaan masyarakat adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia di desa Kayu Bawang khususnya agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan 4 (empat) cara yaitu (1) observasi berupa pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang dilakukan ke lokasi penelitian (2) wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang membantu dan melengkapi pengumpulan data yang tidak dapat diungkap dengan Teknik observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa Kayu Bawang, Sekretaris Desa Kayu Bawang, serta pihak-pihak lain yang terkait (3) kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang berisi daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada subjek atau responden penelitian berupa seperangkat pertanyaan yang dikemas dalam beberapa lembar kertas yang diajukan kepada responden (4) Dokumentasi Lapangan Dokumentasi digunakan untuk mempermudah melakukan pengamatan dilapangan, mempermudah dalam melakukan pengeditan dan kajian data selanjutnya serta memperoleh gambaran suasana di lapangan. Selama penelitian ini untuk mendokumentasikan kondisi Desa Kayu Bawang dilakukan dengan fotografi digital dan handphone.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Proses*) atau bisa juga disebut Proses Hierarki Analitik (PHA) merupakan teknik yang dikembangkan oleh profesor di Wharston School Of Business pada tahun 1970-an (M. Firdaus, Harmini, & M.A, 2011).

HASIL DAN ANALISIS

Karakteristik Responden

Pada saat penelitian dilapangan penulis melakukan wawancara dengan 6 responden yang telah ditentukan. Responden-responden tersebut terdiri dari (1) Bapak H. Ahmad Fauzi, SE, M.Si, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar yang merupakan perwakilan masyarakat desa Kayu Bawang yang berperan mendorong masyarakat desa untuk aktif dan partisipatif. (2) Bapak H. Zakaria, Sekretaris Camat Kecamatan Gambut yang merupakan narasumber dari perwakilan pemerintahan daerah yang memberikan informasi terkait kondisi ekonomi di Desa Kayu Bawang. (3) Bapak M. Arsyad, Kepala Desa Kayu Bawang, narasumber yang merupakan pimpinan tertinggi yang ada di Desa Kayu Bawang, yang memberikan informasi terkait kondisi ekonomi di Desa Kayu Bawang. (4) Bapak Ilmi Thalib,

Kepala RT.02 yang selaku ketua RT dan sekaligus salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di Desa Kayu Bawang, dalam hal ini narasumber terkait memberikan informasi kondisi ekonomi dan masyarakat di Desa Kayu Bawang. (5) Bapak Anang Rahmat Nur, Kepala RT.03 yang selaku ketua RT dan sekaligus salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di Desa Kayu Bawang, dalam hal ini narasumber terkait memberikan informasi kondisi ekonomi dan masyarakat di Desa Kayu Bawang. (6) Bapak Jambrani, Kepala RT.04 yang selaku ketua RT dan sekaligus salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di Desa Kayu Bawang, dalam hal ini narasumber terkait memberikan informasi kondisi ekonomi dan masyarakat di Desa Kayu Bawang.

Analisis Prioritas Belanja Desa Pada Dana Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar
Rata-Rata Geometrik Kriteria

Tabel 1
Rata-rata Geometriks Kriteria

Responden	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa
1	9	7	6
2	8	5	7
3	9	6	7
4	8	6	7
5	7	4	6
6	8	6	7
Jumlah	290.304	30.240	86.436
Rata-rata	8	6	7

Sumber : Hasil data diolah

Dapat dilihat bahwa rata-rata geometrik RPJMDes memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 8,1 yang dibulatkan menjadi 8, Potensi Desa 5,58 yang dibulatkan menjadi 6, permasalahan desa 6,65 yang dibulatkan menjadi 7. Dari 6 narasumber rata-rata kriteria alternatif yang memiliki nilai tertinggi adalah RPJMDes, dalam hal ini menurut pendapat narasumber yang diperoleh peneliti dari lapangan RPJMDes dianggap sebuah hal yang sangat penting dalam membangun sebuah desa sehingga apabila sudah memiliki RPJMDes yang baik maka perlu adanya pengelolaan yang baik agar RPJMDes tersebut bisa bermanfaat.

Rata-Rata Geometrik Untuk Alternatif

Tabel 2
Rata-rata Geometriks Alternatif RPJMDes

Responden	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Masyarakat
1	3	8	7	6
2	4	9	8	7
3	5	9	8	7
4	3	9	8	8
5	4	9	8	7
6	4	8	7	6
Jumlah	2.880	419.904	200.704	98.784
Rata-rata	4	9	8	7

Sumber : Hasil data diolah

Pada tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan rata-rata geometrik dimana pada kriteria alternatif RPJMDES, rata-rata geometrik tertinggi yaitu pada Pembangunan Desa sebesar: 8,65 dan apabila dibulatkan maka nilainya 9, Pemberdayaan Masyarakat: 7,65 dan apabila dibulatkan menjadi 8, Pembinaan Masyarakat: 6,79 apabila dibulatkan menjadi 7, Penyelenggaraan Pemerintah Desa: 3,77 apabila dibulatkan menjadi 4. Rata-rata dari 6 responden memberikan nilai yang tinggi untuk pembangunan desa karena responden menganggap bahwa memang pembangunan desa tersebut harus terlaksana dengan baik, namun beberapa responden yang mewakili masyarakat justru berpendapat dan memberikan penilaian yang cukup tinggi untuk pemberdayaan masyarakat karena menurut mereka dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat tersebut secara beriringan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun bagi pemerintah, tidak hanya berfokus pada satu bidang saja.

Tabel 3
Rata-rata Geometriks Alternatif Potensi Desa

Responden	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Masyarakat
1	3	7	9	8
2	3	6	8	7
3	4	8	7	6
4	3	5	8	6
5	3	6	8	7
6	3	6	7	8
Jumlah	972	60.480	225.792	112.896
Rata-rata	3	6	8	7

Sumber : Hasil data diolah

Kriteria alternatif potensi desa, rata-rata geometrik tertinggi yaitu pemberdayaan masyarakat dengan rata-rata geometrik sebesar: 7,80 apabila dibulatkan menjadi 8, Pembinaan Masyarakat memiliki rata-rata geometrik sebesar: 6,95 apabila dibulatkan menjadi 7, pembangunan desa memiliki rata-rata geometrik sebesar: 6,26 apabila dibulatkan menjadi 6, dan penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki rata-rata geometrik sebesar: 3,14 apabila dibulatkan menjadi 3. Menurut keterangan narasumber yang di dapatkan peneliti pada saat dilapangan kebanyakan memberikan respon nilai tertinggi pada pemberdayaan masyarakat dikarenakan untuk mengembangkan suatu potensi suatu desa, masyarakat harus memiliki kualitas yang baik, terlebih lagi masyarakat desa +70% merupakan petani tentunya masyarakat setempat memerlukan sebuah startegi untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusianya.

Tabel 4
Rata-rata Geometriks Alternatif Permasalahan Desa

Responden	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Masyarakat
1	3	9	8	6
2	4	8	7	6
3	4	8	6	7
4	3	7	5	4
5	3	8	7	6
6	3	8	7	5
Jumlah	1.296	258.048	82.320	30.240
Rata-rata	3	8	7	6

Sumber : Hasil data diolah

Kriteria alternatif permasalahan desa, rata-rata geometrik tertinggi yaitu pembangunan desa dengan rata-rata geometrik sebesar: 7,97 apabila dibulatkan menjadi 8, Pemberdayaan Masyarakat memiliki rata-rata geometrik sebesar: 6,59 apabila dibulatkan menjadi 7, pembinaan masyarakat memiliki rata-rata geometrik sebesar: 5,58 apabila dibulatkan menjadi 6, dan penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki rata-rata geometrik sebesar: 3,30 apabila dibulatkan menjadi 3 Menurut respon dari narasumber yang di dapat peneliti saat turun ke lapangan adalah rata-rata seluruh narasumber menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan agar masyarakat merasa nyaman beraktifitas dikarenakan saran dan prasana di desa Kayu Bawang masih terbiling minim, jalan desa masih banyak belum beraspal sehingga menyulitkan masyarakat dalam mobilisasi, terlebih lagi tiap

tahun desa Kayu Bawang mengalami banjir tentu hal ini harus segera dibenahi desa Kayu Bawang.

Tabel 5
Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Alternatif

KRITERIA	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa
RPJMDes	1	3	2
Potensi Desa	0.33	1	0.5
Permasalahan Desa	0.5	2	1
Jumlah	1.83	6.00	3.50

Sumber: Hasil Data Diolah

Tabel 5 menunjukkan matriks perbandingan berpasangan antara kriteria alternatif untuk memilih potensi mana yang akan dijadikan prioritas belanja desa pada dana desa. Perbandingan antara kriteria alternatif RPJMDes dengan Potensi Desa bernilai 3 yang artinya kriteria RPJMDes memiliki prioritas yang sedikit lebih penting daripada kriteria potensi desa. Perbandingan kriteria RPJMDes dengan permasalahan desa memiliki nilai 2 yang artinya RPJMDes dan permasalahan desa memiliki prioritas yang hampir sama penting, namun kriteria RPJMDes sedikit lebih penting dibanding kriteria permasalahan desa. Perbandingan antara potensi desa dengan permasalahan desa bernilai 2 yang berarti bahwa kriteria kriteria potensi desa memiliki prioritas yang hampir sama penting dengan kriteria permasalahan desa, tetapi kriteria permasalahan desa sedikit lebih penting daripada kriteria potensi desa.

Penentuan Prioritas

Tabel 6
Matriks Bobot Untuk Kriteria

KRITERIA	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa	Jumlah baris	Rata-rata (Vektor Prioritas)
RPJMDes	0.5455	0.5000	0.5714	1.6169	0.54
Potensi Desa	0.1818	0.1667	0.1429	0.4913	0.16
Permasalahan Desa	0.2727	0.3333	0.2857	0.8918	0.30
Jumlah					1.0000

Sumber: Hasil Data Diolah

Pada tabel 6 dapat kita lihat bahwa Eigen Vector (bobot) yang merupakan nilai bobot rata-rata yang diperoleh dari nilai rata-rata bobot masing-masing kriteria. Persentase prioritas atau preferensi untuk kriteria alternatif RPJMDes: 0,54 atau sebesar

54%, kriteria Potensi desa: 0,16 atau 16%, kriteria Permasalahan desa: 0,30 atau 30%. Untuk kriteria prefensi RPJMDes lebih tinggi dibandingkan dengan potensi desa dan permasalahan desa.

Rasio Konsistensi

Tabel 7
Matriks Rasio Konsistensi Kriteria

KRITERIA	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa	Jumlah baris
RPJMDes	0.538961	0.491342	0.594517	1.624820
Potensi Desa	0.179654	0.163781	0.148629	0.492063
Permasalahan Desa	0.269481	0.327561	0.297258	0.894300

Sumber: Hasil Data Diolah

$$\begin{pmatrix} 0.538961 \\ 0.163781 \\ 0.297258 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 1.624820 \\ 0.492063 \\ 0.894300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.00 \\ 3.01 \\ 3.00 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_{maks} = \frac{3.00 + 3.01 + 3.00}{3} = 3.01$$

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n-1} = \frac{3.01-3}{3-1} = \frac{0.01}{2} = 0,0050$$

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

$$= \frac{0,0050}{0,58} = 0,0086$$

Pada perhitungan rasio konsistensi (*Consistency Ratio*) sebesar 0,0086 atau 0,86 yang berarti bahwa jawaban yang diberikan responden pada kuesioner pada penelitian konsisten, karena nilai *Consistency ratio* nya kurang dari 10%. Menurut profesor Saaty nilai rasio konsistensi yang ditetapkan adalah sama atau lebih kecil dari 10% ($\leq 0,1$) yang berarti bahwa penelitian tersebut layak untuk diterima.

Tabel 8
Perangkingan Alternatif (Hasil Penjumlahan Dari Perkalian Setiap Bobot Alternatif Dengan Bobot Kriteria Yang Bersesuaian)

	RPJMDES	POTENSI DESA	PERMASALAHAN DESA	BOBOT KRITERIA	VEKTOR PRIORITAS
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	0.06	0.06	0.06	0.54	0.0600
Pembangunan Desa	0.47	0.18	0.47	0.16	0.4236
Pemberdayaan Masyarakat	0.29	0.47	0.29	0.30	0.3188
Pembinaan Masyarakat	0.18	0.29	0.18		0.1976
			Jumlah		1.000

Sumber : Hasil data diolah

Prioritas keputusan yang diambil adalah: Pembangunan Desa (Preferensi 0,42 atau 42%), dan yang kedua adalah Pemberdayaan Masyarakat (preferensi 0,32 atau 32%), yang ketiga adalah Pembinaan Masyarakat (Preferensi 0,20 atau 20%), yang keempat atau yang terakhir adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Preferensi 0,06 atau 6%). Dengan demikian bidang yang dipilih untuk dijadikan sebagai sektor prioritas untuk belanja desa pada dana Desa Kayu Bawang adalah Pembangunan Desa 42%, yang diikuti oleh Pemberdayaan Masyarakat sebesar 32%, yang diikuti Pembinaan Masyarakat sebesar 20%, dan yang terakhir adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 6%.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan pemilihan belanja desa yang dijadikan sebagai prioritas belanja desa pada dana desa Kayu Bawang yang paling dominan adalah pembangunan desa, yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, yang ketiga adalah pembinaan masyarakat, dan yang terakhir adalah penyelenggaraa pemerintahan desa.

Keterbatasan Penelitian

Pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan belanja desa masih bersifat monoton dan hanya memandang kepada satu belanja desa saja. Masyarakat belum

mampu untuk membaca peluang kedepan secara menyeluruh, sehingga hal tersebut mengakibatkan masyarakat sulit untuk menerima sesuatu hal yang baru.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa belanja desa didesa Kayu Bawang memang masih diperlukan masyarakat terutama dibidang pembangunan desa karena banyak fasilitas yang belum memadai tetapi juga harus diimbangi dengan pemberdayaan dan pembinaan masyarakatnya agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. (2) Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga kriteria hasil perhitungan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) yang paling dominan berpengaruh terhadap penentuan prioritas belanja desa adalah RPJMDes, selanjutnya yaitu kriteria Permasalahan desa dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kriteria Potensi desa. Berdasarkan ketiga faktor atau kriteria tersebut maka hasil data penelitian menunjukkan preferensi pemilihan prioritas belanja desa lebih dominan pembangunan desa.

Saran

Saran-saran yang dikemukakan penulis yaitu (1) Penelitian yang akan datang lebih memperbanyak variabel atau kriteria diluar dari variabel yang disebutkan dalam penelitian ini .yang dapat disertakan dalam metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), sehingga dapat memperluas hasil penelitian selanjutnya yang berkaitan. (2) Pemanfaatan belanja desa tidak hanya berfokus kepada satu belanja desa, tetapi lebih memanfaatkan kepada kombinasi belanja desa dengan melibatkan peran masyarakat serta inovasi-inovasi, sehingga desa Kayu Bawang menjadi desa yang kuat dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat meningkatkan pendapatan desa dan perekonomian masyarakat juga turut meningkat. (3) Pemerintah dan aparat desa lebih melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait program yang dijalankan, agar masyarakat dapat memahami serta memberi masukan sehingga dapat menerima program yang dijalankan oleh pemerintah.

Bibliography

- Apriliana, Riska (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/Riska Apriliana
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 20 Oktober

- Firdaus, I. H., Abdillah, G., & Renaldi, F. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik. Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016), 2016(Sentika), 440–445. <https://doi.org/10.1111/gcb.13996>
- Firdaus, M., Harmini, & M.A, F. (2011). *Aplikasi Metode Kuantitatif Untuk Manajemen Dan Bisnis*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Hafid, Risma (2017). Pemanfaatan Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Tangkep Tahun 2016. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/SKRIPSI RISMA 135
- Kessa, Wahyudin. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal 19
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Rosalina, Okta (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/ 1209-2377-1-SM
- Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process, Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008
- Shuha, Khalida (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/ 3787-7391-1-SM
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

Tahir, Erni (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/B1B114337_sitedi_SKRIPSI_Erni_Tahir

Umar, M. H. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Edisi 2). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada